

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Atsar, A. (2018). *Hukum perikatan Indonesia dalam suatu pendekatan perbandingan hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Badruzaman, M. D. (2015). *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dewi, S. (2009). *Cyber Law Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. Bandung: Widya Padjadjaran
- Isnaeni, M. (2022). *Penjabaran norma hukum perikatan (bagian umum)*. Surabaya: CV Revka Prima Media.
- Jurdi, F. (2017). *Logika hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber law: Aspek data privasi menurut hukum internasional, regional, dan nasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Salim HS. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, I. K. O. (2017). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soenandar, T., et al. (2016). *Kompilasi hukum perikatan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Soeroso, R. (2009). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Jakarta: Grafika.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 75)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Lembaran Lepas Kementerian Sekretariat Negara: 13 Hlm).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4674, Lembaran Lepas Kementerian Sekretariat Negara: 52 Hlm).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5475, Lembaran Lepas Kementerian Sekretariat Negara: 26 Hlm).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 6811, Lembaran Lepas Kementerian Sekretariat Negara: 39 Hlm).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 121/OJK)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, (Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi)

3. Jurnal Ilmiah

Benus, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen *Financial Technology* di Indonesia. *Refleksi Hukum:*

Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 145-160. DOI:
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

Elvina, T. D., & Sulistiyono, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan *debt collector* pelaku pinjaman *online*. *Jurnal Riset Rumpunan Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 364–376. DOI:
<https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i1.5095>

Fatimah Hs, Rahmatullah, M., Hamsah, & Hasmiat. (2025). Independensi lembaga pengawas: Kunci efektivitas Undang-Undang perlindungan data pribadi. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 6(2), 209–223. DOI:10.22437/zaaken.v6i2.43497

Havivah, I., & Wardhani, S. P. (2025). Kebocoran data pribadi pada aplikasi pinjaman *online* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Indonesian Research Journal of Education*, 5(5), 398–407. DOI:10.31004/irje.v5i5.3333

Karuniahaj, Shofa E. (2021). Asas *Privity of Contract* Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus pada Penyelenggara DanaRupiah). *Jurist-Diction*, Vol. 4 No. 4, 1629-1658.

Kim, M. T., Jacob, Y. M. Y., & Bire, C. M. D. (2025). Perlindungan data pribadi pada platform digital pinjaman *online* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Studi kasus di Kota Kupang, NTT). *Artemis Law Journal*, 2(2), 511–526.

Kurdi, & Cahyono, J. (2024). Perlindungan data pribadi di era digital berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2), 330–339. DOI: 10.31289/juncto.v6i2.5443

- Lathifah, D. S., & Maulani, V. R. (2023). Perlindungan data pribadi konsumen pinjaman *online* menurut UU No. 27 Tahun 2022. *AJMIE (Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1), 69–78.
- Madrim, & Nurhidayat. (2023). Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi pinjaman *online*. *Jurnal Sains Student Research*, 1(2), 659–676.
- Mahmudi, D. A., & Alfiana, R. (2026). Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Pinjaman *Online* dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Perdata Penyelenggara Pinjaman *Online*. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 16236–16242.
- Pebrina, A. R., Najwan, J., & Alissa, E. (2022). Fungsi penerapan informed consent sebagai persetujuan pada perjanjian terapeutik. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(3), 468–486.
- Puspitasari, D., Izzatusholekha, Kartini Haniandaresta, S., & Afif, D. (2023). Urgensi Undang-Undang perlindungan data pribadi dalam mengatasi masalah keamanan data penduduk. *Journal of Administrative and Social Science (JASS)*, 4(2), 195–205.
- Rianarizkiwati, N. (2022). Ius constituendum hak atas perlindungan data pribadi: Suatu perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(2), 330–338.
- Yulianto, D. (2024). Analisis Kejahatan Ekonomi dalam Praktik Pinjaman *Online*: Dampak terhadap Masyarakat dan Strategi Penanggulangan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(12), 5641–5657.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, 1(1), 147–154.

4. Sumber Online/Website

- Bloomberg Technoz. (2026). Daftar pinjol resmi OJK Maret 2026, cek 95 yang legal dan berizin. <https://www.bloombergentechnoz.com/detail-news/101713/daftar-pinjol-resmi-ojk-maret-2026-cek-95-yang-legal-dan-berizin/2> diakses pada tanggal 30 Maret 2026
- Cloudian. (n.d.). Data protection principles: Core principles of the GDPR, examples and best practices. <https://cloudian.com/guides/data-protection/data-protection-principles-7-core-principles-of-the-gdpr/> diakses tanggal 1 April 2026
- GDPR Info. (n.d.). *Personal data*. <https://gdpr-info.eu/issues/personal-data/> diakses tanggal 6 Juni 2026
- Gerbang PDP Indonesia. (n.d.). 3 tips untuk membuat consent/persetujuan. <https://gerbangpelindungandatapribadi.id/3-tips-pembuatan-consent/> diakses tanggal 1 April 2026
- Wikanto, A., & Saputra, F. (2026). Ribuan pinjol ilegal diblokir OJK hingga 31 Jan 2026, ini cara lapor aduan resmi. Kontan.co.id. <https://nasional.kontan.co.id/news/ribuan-pinjol-ilegal-diblokir-ojk-hingga-31-jan-2026-ini-cara-lapor-aduan-resmi> diakses tanggal 30 Maret 2026
- Wolford, B. (n.d.). What are the GDPR consent requirements? <https://gdpr.eu/gdpr-consent-requirements/> diakses tanggal 1 April 2026